

Kelompok Budaya Kinerja

KBK

JOKO LOLOONO



**PENINGKATAN KESADARAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR PAJAK**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**





KATA PENGANTAR

Kelompok Budaya Kinerja Joko Loloono merupakan salah satu dari Kelompok Budaya Kinerja yang berada dibawah naungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Kelompok Budaya Kinerja ini dibentuk agar permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja dapat segera diatasi.

Penyusunan Risalah Kelompok Budaya Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari penanganan persoalan yang ditemukan. Risalah Kelompok Budaya Kinerja ini berisikan tentang penanganan permasalahan mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaian dan perencanaan penanganan permasalahan berikutnya.

Tujuan penyusunan Risalah Kelompok Budaya Kinerja ini adalah untuk memberikan *guidance* (petunjuk) tentang pelaksanaan penanganan permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Budaya Kinerja Joko Loloono di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Semoga dengan disusunnya Risalah Kelompok Budaya Kinerja ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi yang membutuhkan;

Banyuwangi, Mei 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 196811061988091001





DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

JUDUL

Langkah 1 MENENTUKAN TEMA & JUDUL

1.1 Latar Belakang Penentuan Tema	1
1.2 Latar Belakang Penentuan Judul	2
1.3 Komentar dan Persetujuan	3
Manajemen	

Langkah 2 MENGANALISA PENYEBAB

2.1 Analisa Penyebab	4
2.2 Menetapkan Penyebab Dominan	6
2.3 Komentar dan Persetujuan	6
Manajemen	

Langkah 3 MENGUJI DAN MENETAPKAN PENYEBAB DOMINAN

3.1 Menguji Penyebab Dominan	7
3.2 Menentukan Penyebab Dominan	17
3.3 Komentar dan Persetujuan	17
Manajemen	

Langkah 4 MEMBUAT RENCANA PERBAIKAN

4.1 Membuat Alternatif Solusi	18
4.2 Menetapkan Solusi Final	18
4.3 Detail Rencana Solusi Final	19
4.4 Prototype Produk Improvement	20
4.5 Analisa Resiko	20
4.6 Penetapan Intermediete Target	21
4.7 Komentar dan Persetujuan	21
Manajemen	

Langkah 5 MELAKSANAKAN PERBAIKAN

5.1 Melaksanakan Perbaikan	22
5.2 Analisa Komparasi Perbaikan	22



5.3	Komentar dan Persetujuan Manajemen	24
-----	---------------------------------------	----

Langkah 6 MENELITI HASIL

6.1	Analisa Komparasi Terhadap Data Judul	25
6.2	Evaluasi Hasil Perbaikan Terhadap Target	30
6.3	Analisa Dampak Perbaikan	31
6.4	Analisa Nilai Improvement	31
6.5	Analisa Cost And Benefit	32
6.6	Komentar dan Persetujuan Manajemen	32

Langkah 7 MEMBUAT STANDAR BARU

7.1	Standar Masukan	33
7.2	Standar Proses	33
7.3	Standar Hasil	34
7.4	Pembakuan Standar	34
7.6	Komentar dan Persetujuan Manajemen	35

Langkah 8 MENCARI DATA BARU DAN MENETAPKAN TEMA BERIKUTNYA

8.1	Latar Belakang Penentuan Tema	36
8.2	Jadwal Kegiatan	38
8.3	Komentar dan Persetujuan Manajemen	38

LAMPIRAN



JUDUL IMPROVEMENT

MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK

NAMA KBK : JOKO LOLOONO
INSTANSI : BADAN PENDAPATAN DAERAH
IMPROVEMENT BIDANG : PELAYANAN

BIODATA KBK

FASILITATOR : Dra. FRANSCISKA SUDARMI, M.Si TANGGAL DIBENTUK : 09-01-2018
 KETUA : TRIKUSUMA JAYA, S.STP TEMA KE : I
 SEKRETARIS : MOHAMMAD MAHFUD, S.Sos RATA-RATA USIA : 39 TAHUN
 ANGGOTA : TINGKAT PENDIDIKAN: SARJANA

1. DEKY WIJAKSONO, SE
2. UNTUNG FAUZI
3. RIVO FIRDAUZY FEBRIANSYAH, SE
4. ARGASUSLIANANDA, S.Kom

JADWAL KEGIATAN

PDC A	LANGKA H	KEGIATAN	PERIODE JANUARI S/D MEI 2018																JUMLAH PERTEMUAN	
			JAN		PEB				MAR				APR				MEI		RENCANA	REALISASI
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
P	1	MENENTUKAN TEMA & JUDUL	■	■															4	4
	2	MENGANALISA PENYEBAB			■	■													4	4
	3	MENGUJI PENYEBAB DOMINAN					■												2	2
D	4	MERENCANAKAN PERBAIKAN					■	■											4	4
	5	MELAKSANAKAN PERBAIKAN							■	■	■	■	■						10	10
C	6	MENELITI HASIL													■	■			4	4
A	7	MEMBUAT STANDAR BARU															■		2	2
	8	MENCARI DATA BARU & MENETAPKAN															■		2	2
			JUMLAH																32	32



Langkah 1.
MENENTUKAN TEMA & JUDUL

1.1 Latar Belakang Penentuan Tema

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan APBD tahun 2011 sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas Negara. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah.

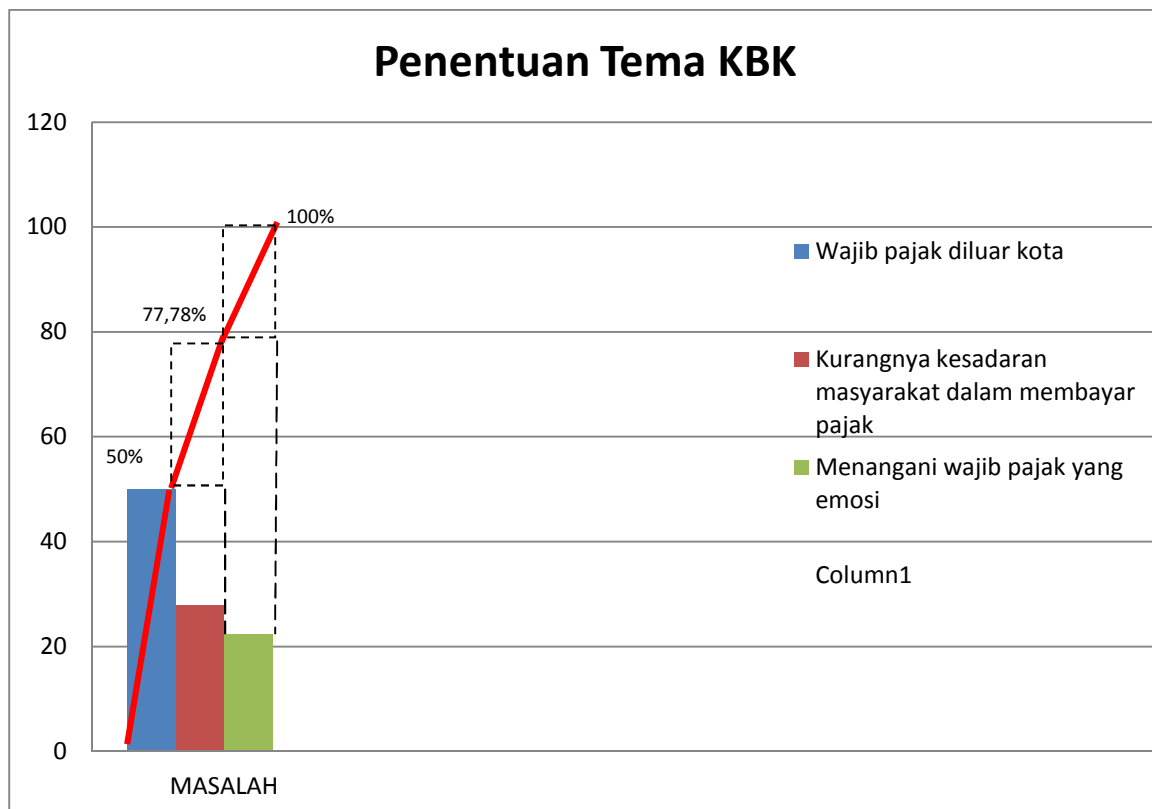
Namun masih banyak Wajib Pajak yang berusaha memperkecil ataupun menghindari pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Inilah yang menjadi permasalahan utama di sektor pembayaran pajak.

Selain permasalahan dari sektor pembayaran pajak, dari sektor Wajib Pajak juga mempunyai permasalahan yakni belum meratanya pemilik usaha yang memiliki NPWPD. Ini juga menjadi permasalahan yang menjadi pembahasan dalam Kelompok Budaya Kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Disamping permasalahan yang terjadi pada sektor pembayaran dan wajib pajak, dari sektor pemungutan pajak pun tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada sektor pemungutan pajak adalah masih ada masyarakat yang mengeluhkan tentang pembayaran pajak yang telah dibayarkan ke petugas namun masih belum terbayarkan ke Bank.



Kode	Masalah	Frek.	Kum.	%	% Kum
A	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	18	18	50,00%	50,00%
B	Wajib pajak diluar kota	10	28	27,78%	77,78%
C	Menangani wajib pajak yang emosi	8	36	22,22%	100,00%



Kesimpulan Tema: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

1.2 Latar Belakang Penentuan Judul

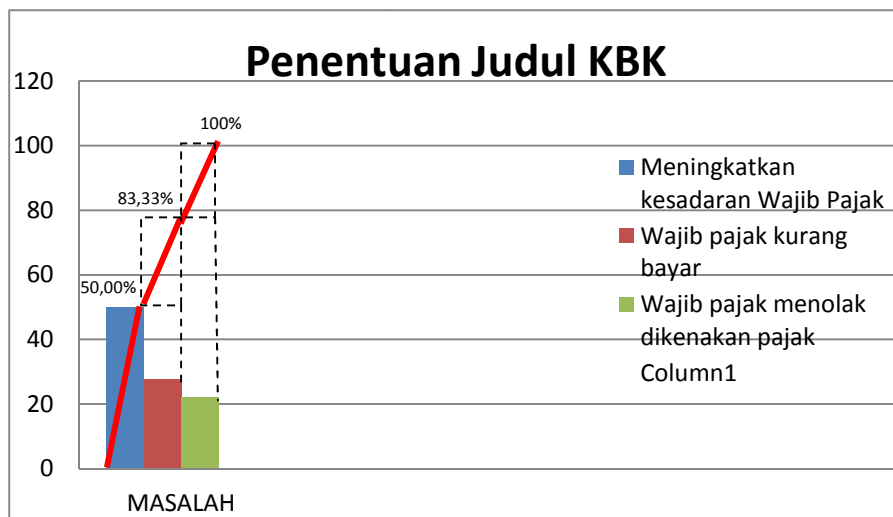
UUD 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada. UUD 1945 Pasal 23 berisi tentang aturan dalam hal keuangan negara yang meliputi penyusunan anggaran belanja, mata uang negara, dan peraturan tentang perpajakan. Khusus perpajakan disusun dalam pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dari isi pasal tersebut jelas sekali jika pasal 23A merupakan sumber hukum utama dari peraturan-peraturan yang menetapkan sistem dan tata cara seluruh perpajakan yang berlaku di Indonesia.

RISALAH BUDAYA KINERJA 2018
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



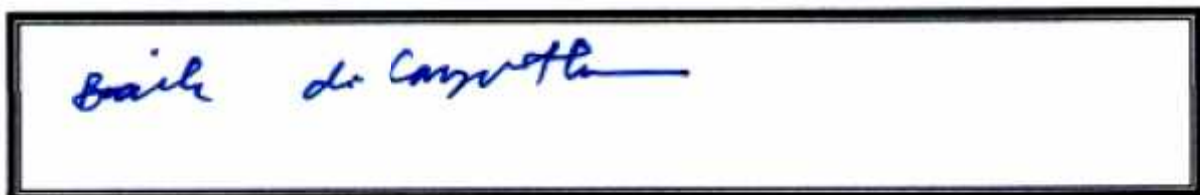
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang diatas menjadi dasar penentuan judul dalam Risalah Kelompok Budaya Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Kode	Masalah	Frek.	Kum.	%	% Kum
A	Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak	18	28	50,00%	50,00%
B	Wajib pajak kurang bayar	12	30	33,33%	83,33%
C	Wajib pajak menolak dikenakan pajak	6	36	16,67%	100,00%



Kesimpulan Judul: Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak

1.3 Komentor dan Persetujuan Manajemnt



Diketahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Di setujui oleh,
Fasilitator,

Ditetapkan oleh,
Ketua KBK,


NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si


Dra. FRANSCISKA SUDARMI, M.si


TRI KUSUMA JAYA, S.STP



Langkah 2.
MENGANALISA PENYEBAB

2.1 Analisa Penyebab

2.1.1 Inventarisasi Penyebab

Urun saran untuk mencari cara agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di kantor Badan Pendapatan Daerah, dilakukan dengan teknik *Brainstorming*, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Usulan
1	tingkat pendapatan wajib pajak
2	sepinya pengunjung hotel melati
3	tingkat pendidikan wajib pajak
4	realisasi penerapan e-tax di restoran kurang sempurna
5	tingkat hunian kamar homestay rendah
6	kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak
7	WP berusaha menghindari pajak
8	pelaporan pendapatan warung makan belum sesuai
9	pajak hiburan kurang pengawasan

Seluruh masalah hasil *Brainstorming* disusun dalam *Why-Why Analisa* untuk menentukan hubungan diantara penyebab masalah sebagai berikut:

	Why I	Why II	Why III	Why IV	Why V
man	sepinya pengunjung hotel melati	tingkat pendidikan wajib pajak	WP berusaha menghindari pajak		
material	tingkat hunian kamar homestay rendah	tingkat pendapatan wajib pajak			
methode	realisasi penerapan e-tax di restoran kurang sempurna				
machine	pelaporan pendapatan warung				

RISALAH BUDAYA KINERJA 2018
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



	makan belum sesuai				
environment	pajak hiburan kurang pengawasan	kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak			

Berdasarkan tabel diatas didapatkan penyebab utama sebagai berikut:

No.	Usulan	Nilai						
		2	1	2	3	1	3	12
1	tingkat pendapatan wajib pajak	2	1	2	3	1	3	12
2	sepinya pengunjung hotel melati	9	9	7	8	8	8	49
3	tingkat pendidikan wajib pajak	1	2	3	2	2	1	11
4	realisasi penerapan e-tax di restoran kurang sempurna	8	7	8	6	7	7	43
5	tingkat hunian kamar homestay rendah	6	8	9	9	9	6	47
6	kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak	4	4	1	4	4	4	21
7	WP berusaha menghindari pajak	3	3	4	1	3	2	16
8	pelaporan pendapatan warung makan belum sesuai	7	6	5	7	6	9	40
9	pajak hiburan kurang pengawasan	5	5	6	5	5	5	31

Setelah melakukan vote, maka diperoleh peringkat sebagai berikut:

No.	Usulan
1	sepinya pengunjung hotel melati
2	tingkat hunian kamar homestay rendah
3	realisasi penerapan e-tax di restoran kurang sempurna
4	pelaporan pendapatan warung makan belum sesuai
5	pajak hiburan kurang pengawasan
6	kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak
7	WP berusaha menghindari pajak
8	tingkat pendapatan wajib pajak
9	tingkat pendidikan wajib pajak



2.2 Menetapkan Penyebab Dominan

Berdasarkan peringkat penyebab diatas, maka penyebab dominan adalah:

$$NGT = \frac{1}{2} n + 1$$

$$NGT = \frac{1}{2} (9) + 1$$

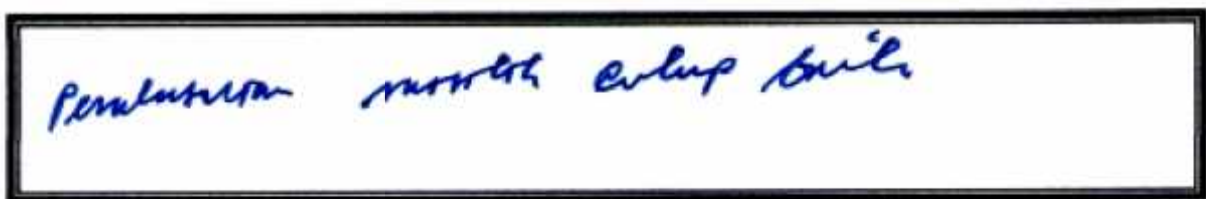
$$NGT = 4 + 1$$

$$NGT = 5$$

maka penyebab dominan adalah:

FAKTOR	PENYEBAB DOMINAN
man	sepinya pengunjung hotel melati
material	tingkat hunian kamar homestay rendah
methode	realisasi penerapan e-tax di restoran kurang sempurna
machine	pelaporan pendapatan warung makan belum sesuai
environment	pajak hiburan kurang pengawasan

2.3 Komentar dan Persetujuan Manajemen



Diketahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah


NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si

Di setujui oleh,
Fasilitator,



Dra. FRANSCISKA SUDARMI, M.si

Ditetapkan oleh,
Ketua KBK,



TRI KUSUMA JAYA, S.STP



Langkah 3.
MENGUJI DAN MENETAPKAN PENYEBAB DOMINAN

3.1 Menguji Penyebab Dominan

3.1.1 Hubungan Antara Sepinya Pengunjung Hotel Melati Terhadap Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak

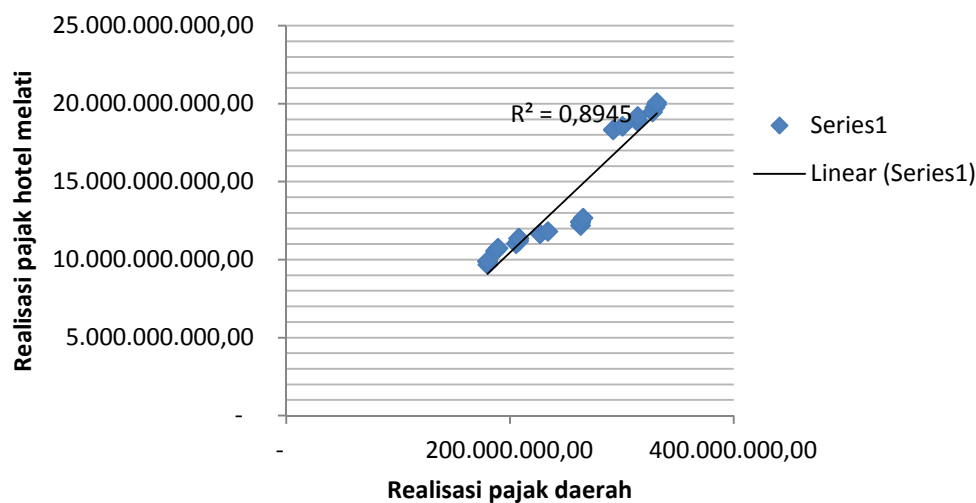
Sepinya pengunjung hotel melati merupakan salah satu penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak. Pengujian potensi ini menggunakan nilai realisasi yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak hotel yang terfokus pada laporan realisasi penerimaan dari sektor hotel melati. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tanggal Feb-Mar	Ralisasi Hotel Melati	Realisasi Pajak
1	180.064.380,00	9.677.797.803,00
2	180.064.380,00	9.897.643.125,00
3	180.064.380,00	9.897.643.125,00
4	180.064.380,00	9.897.643.125,00
5	187.082.080,00	10.562.554.518,00
6	189.342.580,00	10.738.477.891,00
7	205.527.030,00	11.028.207.315,00
8	207.873.430,00	11.195.290.674,00
9	207.873.430,00	11.365.178.704,00
10	207.873.430,00	11.365.178.704,00
11	207.873.430,00	11.365.178.704,00
12	226.878.480,00	11.652.699.743,00
13	233.911.230,00	11.813.025.575,00
14	263.184.348,00	12.194.456.212,00
15	263.184.348,00	12.423.438.073,00
16	263.184.348,00	12.423.438.073,00
17	263.184.348,00	12.423.438.073,00
18	263.184.348,00	12.423.438.073,00
19	265.358.348,00	12.675.542.715,00
20	292.286.108,00	18.335.891.735,00



21	300.633.008,00	18.554.218.590,00
22	313.602.486,00	18.888.337.893,00
23	313.802.486,00	18.964.584.624,00
24	313.802.486,00	18.964.584.624,00
25	313.802.486,00	18.964.584.624,00
26	314.158.486,00	19.201.012.912,00
27	327.523.936,00	19.481.786.190,00
28	329.581.936,00	19.756.755.043,00
1	330.914.436,00	19.956.384.023,00
2	331.375.936,00	20.084.188.631,00

Hubungan Antara Sepinya Pengunjung Hotel Melati Terhadap Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak



Kesimpulan: Data diuji normalitasnya dengan Uji *Kolmogorov Smirnov*, dan didapatkan distribusi data seluruhnya berada dalam range normal. Sehingga dapat dilakukan uji regresi dan didapatkan nilai hubungan sebesar $R^2 = 0,894$ atau nilai korelasi sebesar $R = 0,945$. Nilai ini menggambarkan adanya hubungan antara sepiunya pengunjung hotel melati terhadap kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.



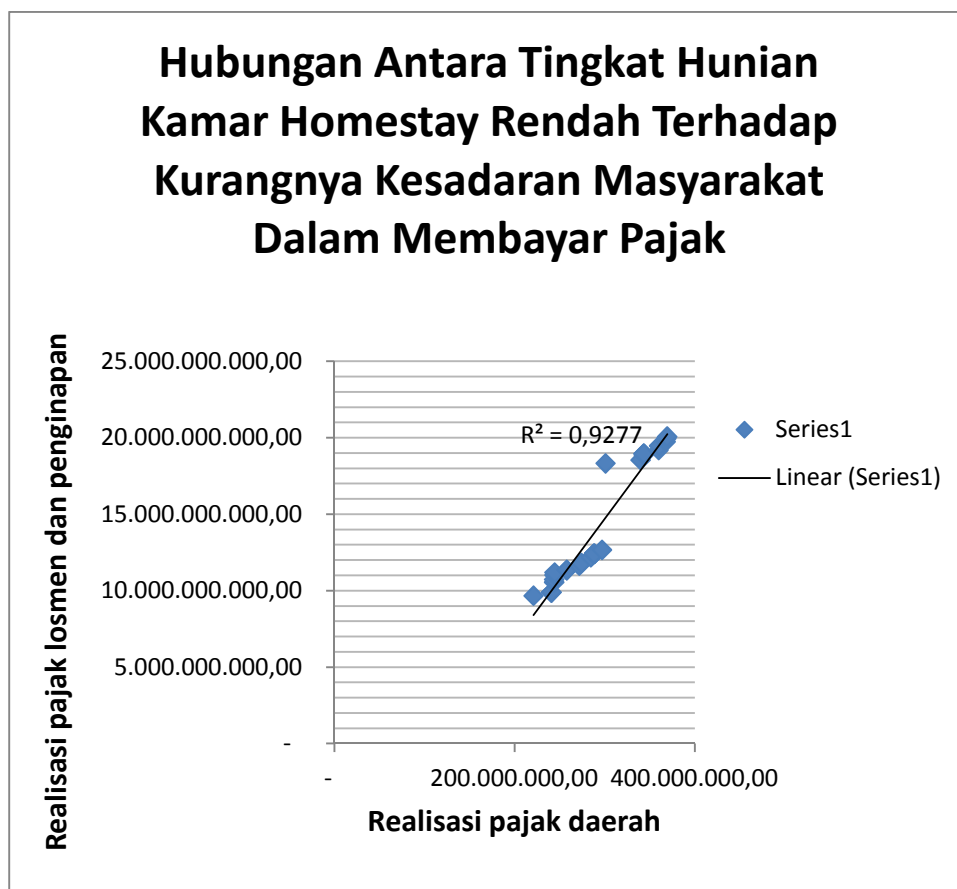
3.1.2 Hubungan Antara Tingkat Hunian kamar Homestay Rendah Terhadap Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Tingkat hunian kamar homestay rendah merupakan salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak. Pengujian potensi ini menggunakan nilai realisasi yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak hotel yang terfokus pada laporan realisasi penerimaan dari sektor Losmen atau Penginapan yang merupakan bagian dari Homestay. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tanggal Feb-Mar	Ralisasi Losmen atau Penginapan	Realisasi Pajak
1	41.545.727,00	9.677.797.803,00
2	41.545.727,00	9.897.643.125,00
3	41.545.727,00	9.897.643.125,00
4	41.545.727,00	9.897.643.125,00
5	42.280.827,00	10.562.554.518,00
6	42.280.827,00	10.738.477.891,00
7	43.830.827,00	11.028.207.315,00
8	43.905.827,00	11.195.290.674,00
9	44.365.827,00	11.365.178.704,00
10	44.365.827,00	11.365.178.704,00
11	44.365.827,00	11.365.178.704,00
12	50.294.827,00	11.652.699.743,00
13	50.294.827,00	11.813.025.575,00
14	52.127.327,00	12.194.456.212,00
15	52.127.327,00	12.423.438.073,00
16	52.127.327,00	12.423.438.073,00
17	52.127.327,00	12.423.438.073,00
18	52.127.327,00	12.423.438.073,00
19	52.127.327,00	12.675.542.715,00
20	52.382.327,00	18.335.891.735,00
21	52.992.327,00	18.554.218.590,00
22	53.866.327,00	18.888.337.893,00
23	53.866.327,00	18.964.584.624,00



24	53.866.327,00	18.964.584.624,00
25	53.866.327,00	18.964.584.624,00
26	53.866.327,00	19.201.012.912,00
27	54.295.477,00	19.481.786.190,00
28	55.995.477,00	19.756.755.043,00
1	56.245.477,00	19.956.384.023,00
2	56.245.477,00	20.084.188.631,00



Kesimpulan: Data diuji normalitasnya dengan Uji *Kolmogorov Smirnov*, dan didapatkan distribusi data seluruhnya berada dalam range normal. Sehingga dapat dilakukan uji regresi dan didapatkan nilai hubungan sebesar $R^2 = 0,7$ atau nilai korelasi sebesar $R = 0,836$. Nilai ini menggambarkan adanya hubungan antara tingkat hunian kamar homestay rendah terhadap kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.



3.1.3 Hubungan Antara Realisasi Penerapan e-Tax Di Restoran Kurang Sempurna Terhadap Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Realisasi penerapan e-tax di restoran kurang sempurna merupakan salah satu penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak. Pengujian potensi ini menggunakan nilai realisasi yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak restoran yang terfokus pada laporan realisasi penerimaan dari sektor restoran. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tanggal Feb-Mar	Ralisasi Restoran	Realisasi Pajak
1	260.188.894,00	9.677.797.803,00
2	260.188.894,00	9.897.643.125,00
3	260.188.894,00	9.897.643.125,00
4	260.188.894,00	9.897.643.125,00
5	273.460.856,00	10.562.554.518,00
6	274.067.706,00	10.738.477.891,00
7	347.341.398,00	11.028.207.315,00
8	364.511.974,00	11.195.290.674,00
9	364.511.974,00	11.365.178.704,00
10	364.511.974,00	11.365.178.704,00
11	364.511.974,00	11.365.178.704,00
12	368.186.659,00	11.652.699.743,00
13	371.139.159,00	11.813.025.575,00
14	383.854.145,00	12.194.456.212,00
15	469.874.005,00	12.423.438.073,00
16	469.874.005,00	12.423.438.073,00
17	469.874.005,00	12.423.438.073,00
18	469.874.005,00	12.423.438.073,00
19	475.046.230,00	12.675.542.715,00
20	476.594.824,00	18.335.891.735,00
21	486.613.304,00	18.554.218.590,00
22	493.663.404,00	18.888.337.893,00
23	494.504.604,00	18.964.584.624,00



24	494.504.604,00	18.964.584.624,00
25	494.504.604,00	18.964.584.624,00
26	494.504.604,00	19.201.012.912,00
27	550.576.186,00	19.481.786.190,00
28	559.519.336,00	19.756.755.043,00
1	559.519.336,00	19.956.384.023,00
2	559.519.336,00	20.084.188.631,00



Kesimpulan: Data diuji normalitasnya dengan Uji *Kolmogorov Smirnov*, dan didapatkan distribusi data seluruhnya berada dalam range normal. Sehingga dapat dilakukan uji regresi dan didapatkan nilai hubungan sebesar $R^2 = 0,750$ atau nilai korelasi sebesar $R = 0,866$. Nilai ini menggambarkan adanya hubungan antara realisasi penerapan e-tax di restoran kurang sempurna terhadap kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.



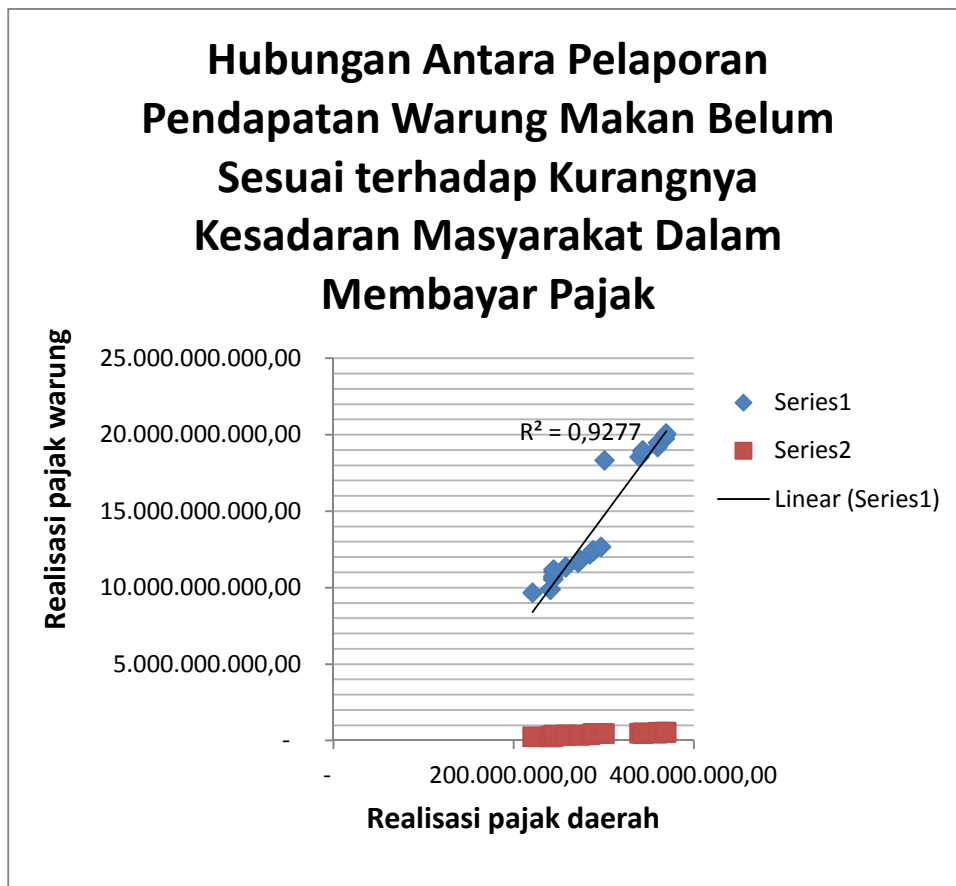
3.1.4 Hubungan Antara Pelaporan Pendapatan Warung Makan Belum Sesuai Terhadap Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Pelaporan pendapatan warung makan belum sesuai merupakan salah satu penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak. Pengujian potensi ini menggunakan nilai realisasi yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak restoran yang terfokus pada laporan realisasi penerimaan dari sektor warung. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tanggal Feb-Mar	Ralisasi Warung	Realisasi Pajak
1	18.760.300,00	9.677.797.803,00
2	18.760.300,00	9.897.643.125,00
3	18.760.300,00	9.897.643.125,00
4	18.760.300,00	9.897.643.125,00
5	21.239.350,00	10.562.554.518,00
6	21.239.350,00	10.738.477.891,00
7	21.239.350,00	11.028.207.315,00
8	21.839.350,00	11.195.290.674,00
9	21.839.350,00	11.365.178.704,00
10	21.839.350,00	11.365.178.704,00
11	21.839.350,00	11.365.178.704,00
12	23.339.350,00	11.652.699.743,00
13	25.839.350,00	11.813.025.575,00
14	26.539.350,00	12.194.456.212,00
15	26.999.350,00	12.423.438.073,00
16	26.999.350,00	12.423.438.073,00
17	26.999.350,00	12.423.438.073,00
18	26.999.350,00	12.423.438.073,00
19	28.229.350,00	12.675.542.715,00
20	28.329.350,00	18.335.891.735,00
21	28.329.350,00	18.554.218.590,00
22	29.584.350,00	18.888.337.893,00
23	29.809.350,00	18.964.584.624,00



24	29.809.350,00	18.964.584.624,00
25	29.809.350,00	18.964.584.624,00
26	29.809.350,00	19.201.012.912,00
27	30.009.350,00	19.481.786.190,00
28	31.224.350,00	19.756.755.043,00
1	31.224.350,00	19.956.384.023,00
2	32.980.050,00	20.084.188.631,00



Kesimpulan: Data diuji normalitasnya dengan Uji *Kolmogorov Smirnov*, dan didapatkan distribusi data seluruhnya berada dalam range normal. Sehingga dapat dilakukan uji regresi dan didapatkan nilai hubungan sebesar $R^2 = 0,797$ atau nilai korelasi sebesar $R = 0,893$. Nilai ini menggambarkan adanya hubungan antara hubungan antara pelaporan pendapatan warung makan belum sesuai terhadap kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.



3.1.5 Hubungan Antara Pajak Hiburan Kurang Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Terhadap Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak

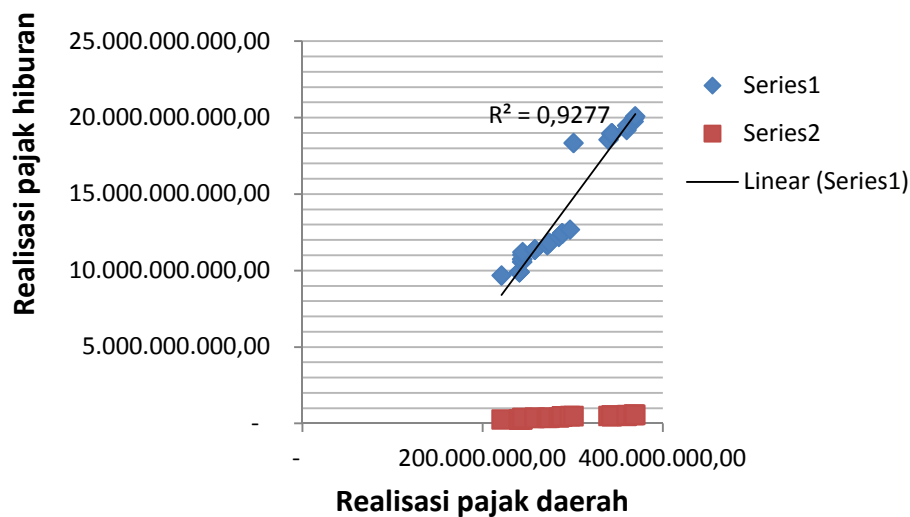
Pajak hiburan kurang pengawasan merupakan salah satu penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak. Pengujian potensi ini menggunakan nilai realisasi yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak hiburan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tanggal Feb-Mar	Ralisasi Hiburan	Realisasi Pajak
1	221.033.781,00	9.677.797.803,00
2	240.833.781,00	9.897.643.125,00
3	240.833.781,00	9.897.643.125,00
4	240.833.781,00	9.897.643.125,00
5	243.833.781,00	10.562.554.518,00
6	243.833.781,00	10.738.477.891,00
7	244.133.781,00	11.028.207.315,00
8	244.386.781,00	11.195.290.674,00
9	257.926.062,00	11.365.178.704,00
10	257.926.062,00	11.365.178.704,00
11	257.926.062,00	11.365.178.704,00
12	271.746.062,00	11.652.699.743,00
13	274.146.062,00	11.813.025.575,00
14	284.690.562,00	12.194.456.212,00
15	288.290.562,00	12.423.438.073,00
16	288.290.562,00	12.423.438.073,00
17	288.290.562,00	12.423.438.073,00
18	288.290.562,00	12.423.438.073,00
19	297.050.562,00	12.675.542.715,00
20	300.954.312,00	18.335.891.735,00
21	339.782.924,00	18.554.218.590,00
22	343.382.924,00	18.888.337.893,00
23	343.382.924,00	18.964.584.624,00
24	343.382.924,00	18.964.584.624,00



25	343.382.924,00	18.964.584.624,00
26	359.901.524,00	19.201.012.912,00
27	360.351.524,00	19.481.786.190,00
28	367.726.924,00	19.756.755.043,00
1	368.326.924,00	19.956.384.023,00
2	369.366.924,00	20.084.188.631,00

Hubungan Antara Pajak Hiburan Kurang Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Terhadap Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak



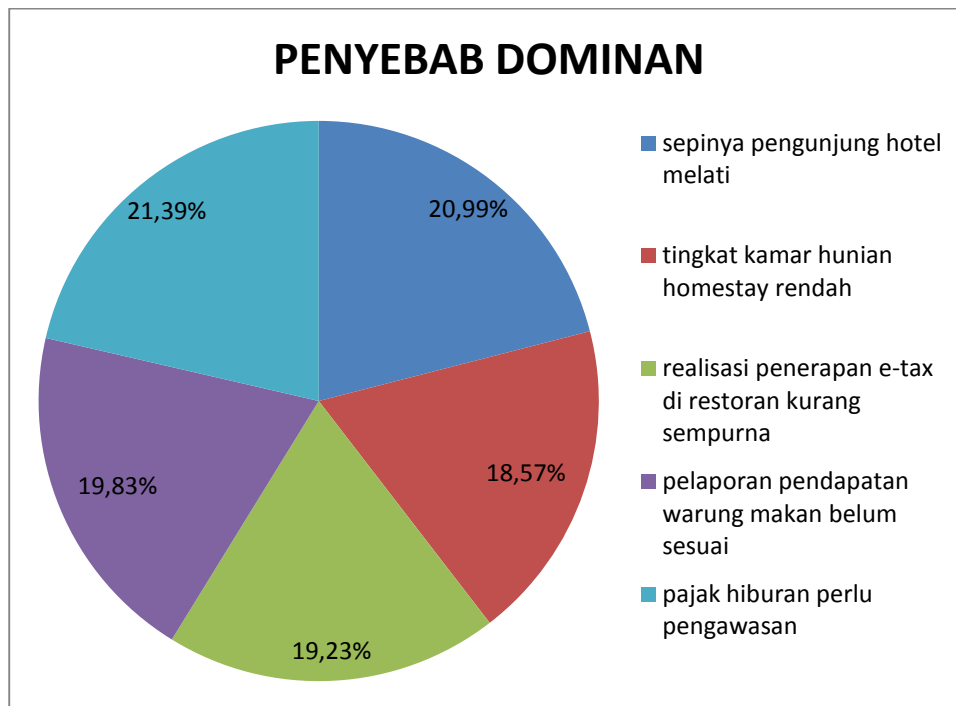
Kesimpulan: Data diuji normalitasnya dengan Uji *Kolmogorov Smirnov*, dan didapatkan distribusi data seluruhnya berada dalam range normal. Sehingga dapat dilakukan uji regresi dan didapatkan nilai hubungan sebesar $R^2 = 0,928$ atau nilai korelasi sebesar $R = 0,963$. Nilai ini menggambarkan adanya hubungan antara pajak hiburan kurang pengawasan terhadap wajib pajak terhadap kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.



3.2 Menentukan Penyebab Dominan

Hasil dari penghitungan korelasi diatas didapatkan penyebab dominan sebagai berikut:

FAKTOR	PENYEBAB DOMINAN	R	%
man	kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak	0,945	20,99%
material	pelayanan pajak yang terpisah di SKPD	0,836	18,57%
methode	nominal pajak terlalu tinggi	0,866	19,23%
machine	penggunaan sistem pembayaran online yang masih belum maksimal	0,893	19,83%
environment	kurang meratanya penenaan pajak terhadap wajib pajak	0,963	21,39%



3.3 Komentar dan Persetujuan Manajemen

Solusikan pada permasalahan penyebab 149 dominan, sbg tolak awal masalah BPD

Diketahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Di setujui oleh,
Fasilitator,

Ditetapkan oleh,
Ketua KBK,

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si

Dri. FRANSCISKA SUDARMI, M.si

TRI KUSUMA JAYA, S.STP



Langkah 4.
MEMBUAT RENCANA PERBAIKAN

4.1 Membuat Alternatif Solusi

Upaya untuk menyelesaikan penyebab dominan dilakukan dengan Brainstorming bersama Fasilitator hingga didapatkan alternative solusi sebagai berikut

No.	FAKTOR	PENYEBAB DOMINAN	ALTERNATIF SOLUSI
1	man	sepingnya pengunjung hotel melati	survey pengunjung hotel melati
2	material	tingkat hunian kamar homestay rendah	pengawasan tingkat hunian homestay
3	methode	realisasi penerapan e-tax di restoran kurang sempurna	pemasangan e-tax model baru
4	machine	pelaporan pendapatan warung makan belum sesuai	pengecekan pelaporan pendapatan warung makan
5	environment	pajak hiburan kurang pengawasan	pemeriksaan pelaporan pajak hiburan

4.2 Menetapkan Solusi Final

Penentuan solusi final dilakukan dengan pembobotan. Bobot tertinggi diberikan alternative solusi yang paling memungkinkan dan mudah dilakukan antara lain:

NO	ALTERNATIF SOLUSI	BIAYA		KEAHLIAN		WAKTU		TOTAL BOBOT
		KET.	BOBOT	KET.	BOBOT	KET.	BOBOT	
1	survey pengunjung hotel melati	552.270.000,00	4	mudah	10	3 bulan	5	19
2	pengawasan tingkat hunian homestay		4	mudah	10	2 bulan	7	21
3	pemasangan e-tax model baru		4	sedang	8	4 bulan	4	16
4	pengecekan pelaporan pendapatan warung makan		4	sedang	8	3 bulan	5	17
5	pemeriksaan pelaporan pajak hiburan		4	mudah	10	4 bulan	4	18



Berdasarkan hasil pembobotan dipilih alternatif solusi dengan bobot tertinggi, yaitu tidak membutuhkan biaya, dapat dilakukan oleh petugas dan tidak membutuhkan keahlian tertentu serta tidak membutuhkan waktu khusus untuk dilaksanakan. data solusi pada tabel berikut:

NO.	ALTERNATIF SOLUSI	BIAYA	KEAHLIAN	WAKTU	TOTAL BOBOT
1	pengawasan tingkat hunian homestay	552.270.000,00	mudah	2 bulan	21
2	survey pengunjung hotel melati		mudah	3 bulan	19
3	pemeriksaan pelaporan pajak hiburan		mudah	4 bulan	18
4	pengecekan pelaporan pendapatan warung makan		sedang	3 bulan	17
5	pemasangan e-tax model baru		sedang	4 bulan	16

4.3 Detail Rencana Solusi Final

MASALAH	PENYEBAB	WHY	WHAT	WHERE	WHEN
kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	dibutuhkan pengawasan homestay	untuk mengetahui tingkat hunian kamar	melakukan pemeriksaan homestay agar sesuai peraturan	homestay	mulai 1 pebruari 2018
	harus disurvey hotel melati	dibutuhkan dalam evaluasi	melaksanakan survey kunjungan di hotel melati	hotel melati	mulai 1 pebruari 2018
	diadakan pemeriksaan pajak hiburan	pemeriksaan dapat meningkatkan potensi	mewawancarai dan menilai laporan keuangan	tempat karaoke dan hiburan lainnya	mulai 1 pebruari 2018
	butuh pengecekan warung makan	pengawasan self assessment	menyesuaikan antara pembayaran pajak dan potensi	warung makan	mulai 1 pebruari 2018
	penggantian pemasangan e-tax model baru	pergantian dan efektivitas alat	pengawasan terhadap pembayaran pajak dari konsumen	restoran	mulai 1 pebruari 2018




4.4 Prototype Produk Improvement

Prototype produk pada budaya kinerja ini adalah dengan membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah. Tim ini melakukan pemeriksaan pada wajib pajak pada sektor pajak yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan oleh Kelompok Budaya Kinerja.

4.5 Analisa Resiko

Berdasarkan Analisa Resiko terkait peningkatan kesadaran wajib pajak berada pada kuadran dengan dampak resiko sedang dengan nilai = 6, sebagai berikut

Potensi Resiko	Dampak				
	Dapat diabaikan	Minor	Medium	Mayor	Katastropik
Sangat jarang	1	2	3	4	5
Jarang	2	4	6	8	10
Mungkin	3	6 	9	12	15
Mungkin terjadi	4	8	12	16	20
Hamper selalu	5	10	15	20	25

1-3 Rendah	4-6 Sedang	7-12 Signifikan	15-25 Tinggi
------------	------------	-----------------	--------------

No.	Potensi Resiko	Tingkat Resiko	Mitigasi Resiko
1	Resiko wajib pajak tidak membayar pajak (Karena beralasan sepi pengunjung)	minor	Dengan pemasangan tax monitor yang simple, dan memudahkan pengawasan dan

RISALAH BUDAYA KINERJA 2018
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



			pelaporan
2	Resiko wajib pajak membayar dengan nominal dibawah seharusnya (Karena perbedaan antara self assessment pajak dan realita dilapangan)	mungkin	Telah diadakan penelitian pemetaan potensi pajak

4.6 Penetapan Intermediete Target

FAKTOR YANG DIEVALUASI	FREKUENSI MASALAH	INTERMEDIETE TARGET	PERUBAHAN	% PERUBAHAN
TARGET UTAMA				
realisasi pajak rata-rata bulan pebruari	358.841.063,03	100.000.000,00	458.841.063,03	22%
TARGER PENDUKUNG				
realisasi pajak hotel melati rata-rata bulan pebruari	5.217.639,86	1.000.000,00	6.217.639,86	16%
realisasi pajak losmen dan penginapan rata-rata bulan pebruari	506.887,93	500.000,00	1.006.887,93	50%
realisasi pajak restoran rata-rata bulan pebruari	10.321.739,38	3.000.000,00	13.321.739,38	23%
realisasi pajak warung rata-rata bulan pebruari	490.336,21	50.000,00	540.336,21	9%
realisasi pajak hiburan rata-rata bulan pebruari	5.114.935,97	800.000,00	5.914.935,97	14%

4.7 Komentar dan Persetujuan Manajemen

Di optimalkan lagi.

Diketahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si

Di setuju oleh,
Fasilitator,

Dra. FRANSKISKA SUDARMI, M.Si

Ditetapkan oleh,
Ketua KBK,

TRI KUSUMA JAYA, S.STP



Langkah 5.
MELAKSANAKAN PERBAIKAN

5.1 Melaksanakan Perbaikan

MASALAH	PENYEBAB	WHY	WHAT	WHERE	WHEN	WHO	KEPUTUSAN KBK
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	Dibutuhkan pengawasan homestay	Untuk mengetahui tingkat hunian kamar	Melakukan pemeriksaan homestay agar sesuai peraturan	Homestay	Mulai 1 april 2018	Ketua tim pemeriksa pajak	Baik
	Harus disurvei hotel melati	Dibutuhkan dalam evaluasi	Melaksanakan survey kunjungan di hotel melati	Hotel melati	Mulai 1 April 2018	Ketua tim pemeriksa pajak	Baik
	Diadakan pemeriksaan pajak hiburan	Pemeriksaan dapat meningkatkan potensi	Mewawancara i dan menilai laporan keuangan	Tempat karaoke dan hiburan lainnya	Mulai 1 April 2018	Ketua tim pemeriksa pajak	Baik
	Butuh pengecekan warung makan	Pengawasan self assessment	Menyesuaikan antara pembayaran pajak dan potensi	Warung makan	Mulai 1 April 2018	Ketua tim pemeriksa pajak	Baik
	Penggantian pemasangan e-tax model baru	Pergantian dan efektivitas alat	Pengawasan terhadap pembayaran pajak dari konsumen	Restoran	Mulai 1 April 2018	Ketua tim pemeriksa pajak	Baik

5.2 Analisa Komparasi Perbaikan

SEBELUM PERBAIKAN	PROSES PERBAIKAN	HASIL PERBAIKAN
5.217.639,86		6.380.477,90
Realisasi	Pemeriksaan penghuni hotel melati	

RISALAH BUDAYA KINERJA 2018
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



506.887,93		4.623.566,31
	Pemeriksaan homestay	
10.321.739,38		18.132.359,97
	Sosialisasi e-tax di restoran	
490.336,21		567.728,38
	Pemeriksaan warung	
5.114.935,97		6.134.583,86
	Pemeriksaan wajib pajak hiburan	



5.3 Komentar dan Persetujuan Manajemen

revisi dapat bisa terwujud.

Diketahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah


NAFIJUL HUDA, S.Sos, M.Si

Di setuju oleh,
Fasilitator,


Dra. FRANSCISKA SUDARMI, M.si

Ditetapkan oleh,
Ketua KBK,


TRI KUSUMA JAYA, S.STP



Langkah 6.
MENELITI HASIL

6.1 Analisa Komparasi Terhadap Data Judul

Dilakukan perbandingan data atas faktor yang berpengaruh terhadap masalah sebagai berikut:

6.1.1 Realisasi Pajak Daerah

TANGGAL		REALISASI PAJAK	
PRE	POST	PRE	POST
2/1/2018	5/1/2018	9.677.797.803,00	42.096.516.504,00
2/2/2018	5/2/2018	9.897.643.125,00	42.233.006.539,00
2/3/2018	5/3/2018	9.897.643.125,00	42.431.467.179,00
2/4/2018	5/4/2018	9.897.643.125,00	42.730.372.982,00
2/5/2018	5/5/2018	10.562.554.518,00	42.730.372.982,00
2/6/2018	5/6/2018	10.738.477.891,00	42.730.372.982,00
2/7/2018	5/7/2018	11.028.207.315,00	43.030.940.390,00
2/8/2018	5/8/2018	11.195.290.674,00	43.596.361.653,00
2/9/2018	5/9/2018	11.365.178.704,00	43.848.077.235,00
2/10/2018	5/10/2018	11.365.178.704,00	43.848.409.235,00
2/11/2018	5/11/2018	11.365.178.704,00	44.142.610.405,00
2/12/2018	5/12/2018	11.652.699.743,00	44.142.610.405,00
2/13/2018	5/13/2018	11.813.025.575,00	44.142.610.405,00
2/14/2018	5/14/2018	12.194.456.212,00	44.463.334.150,00
2/15/2018	5/15/2018	12.423.438.073,00	45.251.182.591,00
2/16/2018	5/16/2018	12.423.438.073,00	51.319.598.381,00
2/17/2018	5/17/2018	12.423.438.073,00	52.012.104.665,00
2/18/2018	5/18/2018	12.423.438.073,00	52.235.499.396,00
2/19/2018	5/19/2018	12.675.542.715,00	52.235.499.396,00
2/20/2018	5/20/2018	18.335.891.735,00	52.235.499.396,00
2/21/2018	5/21/2018	18.554.218.590,00	52.568.316.737,00
2/22/2018	5/22/2018	18.888.337.893,00	53.233.236.806,00
2/23/2018	5/23/2018	18.964.584.624,00	53.732.327.945,00
2/24/2018	5/24/2018	18.964.584.624,00	54.319.589.938,00
2/25/2018	5/25/2018	18.964.584.624,00	54.816.576.142,00
2/26/2018	5/26/2018	19.201.012.912,00	54.816.576.142,00
2/27/2018	5/27/2018	19.481.786.190,00	54.816.576.142,00
2/28/2018	5/28/2018	19.756.755.043,00	55.055.882.744,00
3/1/2018	5/29/2018	19.956.384.023,00	55.055.882.744,00
3/2/2018	5/30/2018	20.084.188.631,00	55.538.593.976,00
RATA-RATA		14.205.753.303,80	48.513.666.872,90



6.1.2 Realisasi Hotel Melati

TANGGAL		REALISASI HOTEL MELATI	
PRE	POST	PRE	POST
2/1/2018	5/1/2018	180.064.380,00	678.908.563,00
2/2/2018	5/2/2018	180.064.380,00	683.137.063,00
2/3/2018	5/3/2018	180.064.380,00	700.683.163,00
2/4/2018	5/4/2018	180.064.380,00	703.491.163,00
2/5/2018	5/5/2018	187.082.080,00	703.491.163,00
2/6/2018	5/6/2018	189.342.580,00	703.491.163,00
2/7/2018	5/7/2018	205.527.030,00	705.879.163,00
2/8/2018	5/8/2018	207.873.430,00	766.381.124,00
2/9/2018	5/9/2018	207.873.430,00	785.796.424,00
2/10/2018	5/10/2018	207.873.430,00	785.796.424,00
2/11/2018	5/11/2018	207.873.430,00	793.281.424,00
2/12/2018	5/12/2018	226.878.480,00	793.281.424,00
2/13/2018	5/13/2018	233.911.230,00	793.281.424,00
2/14/2018	5/14/2018	263.184.348,00	793.878.924,00
2/15/2018	5/15/2018	263.184.348,00	813.222.401,00
2/16/2018	5/16/2018	263.184.348,00	822.658.401,00
2/17/2018	5/17/2018	263.184.348,00	822.658.401,00
2/18/2018	5/18/2018	263.184.348,00	835.850.422,00
2/19/2018	5/19/2018	265.358.348,00	835.850.422,00
2/20/2018	5/20/2018	292.286.108,00	835.850.422,00
2/21/2018	5/21/2018	300.633.008,00	836.910.422,00
2/22/2018	5/22/2018	313.602.486,00	842.602.422,00
2/23/2018	5/23/2018	313.802.486,00	842.602.422,00
2/24/2018	5/24/2018	313.802.486,00	842.602.422,00
2/25/2018	5/25/2018	313.802.486,00	853.923.022,00
2/26/2018	5/26/2018	314.158.486,00	853.923.022,00
2/27/2018	5/27/2018	327.523.936,00	853.923.022,00
2/28/2018	5/28/2018	329.581.936,00	854.269.022,00
3/1/2018	5/29/2018	330.914.436,00	854.269.022,00
3/2/2018	5/30/2018	331.375.936,00	863.942.422,00
RATA-RATA		255.241.883,93	795.194.543,27

6.1.3 Realisasi Losmen dan Penginapan

TANGGAL		REALISASI LOSMEN DAN PENGINAPAN	
PRE	POST	PRE	POST
2/1/2018	5/1/2018	41.545.727,00	89.562.227,00
2/2/2018	5/2/2018	41.545.727,00	89.562.227,00
2/3/2018	5/3/2018	41.545.727,00	90.686.727,00

RISALAH BUDAYA KINERJA 2018
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



2/4/2018	5/4/2018	41.545.727,00	91.236.727,00
2/5/2018	5/5/2018	42.280.827,00	91.236.727,00
2/6/2018	5/6/2018	42.280.827,00	91.236.727,00
2/7/2018	5/7/2018	43.830.827,00	91.461.727,00
2/8/2018	5/8/2018	43.905.827,00	91.461.727,00
2/9/2018	5/9/2018	44.365.827,00	99.388.527,00
2/10/2018	5/10/2018	44.365.827,00	99.388.527,00
2/11/2018	5/11/2018	44.365.827,00	100.658.527,00
2/12/2018	5/12/2018	50.294.827,00	100.658.527,00
2/13/2018	5/13/2018	50.294.827,00	100.658.527,00
2/14/2018	5/14/2018	52.127.327,00	100.658.527,00
2/15/2018	5/15/2018	52.127.327,00	102.401.527,00
2/16/2018	5/16/2018	52.127.327,00	102.629.027,00
2/17/2018	5/17/2018	52.127.327,00	102.629.027,00
2/18/2018	5/18/2018	52.127.327,00	103.629.027,00
2/19/2018	5/19/2018	52.127.327,00	103.629.027,00
2/20/2018	5/20/2018	52.382.327,00	103.629.027,00
2/21/2018	5/21/2018	52.992.327,00	103.629.027,00
2/22/2018	5/22/2018	53.866.327,00	107.287.391,00
2/23/2018	5/23/2018	53.866.327,00	107.437.391,00
2/24/2018	5/24/2018	53.866.327,00	107.437.391,00
2/25/2018	5/25/2018	53.866.327,00	107.437.391,00
2/26/2018	5/26/2018	53.866.327,00	107.437.391,00
2/27/2018	5/27/2018	54.295.477,00	107.437.391,00
2/28/2018	5/28/2018	55.995.477,00	107.437.391,00
3/1/2018	5/29/2018	56.245.477,00	107.437.391,00
3/2/2018	5/30/2018	56.245.477,00	223.645.650,00
RATA-RATA		49.414.017,00	104.434.214,83

6.1.4 Realisasi Restoran

TANGGAL		REALISASI RESTORAN	
PRE	POST	PRE	POST
2/1/2018	5/1/2018	260.188.894,00	1.366.706.006,00
2/2/2018	5/2/2018	260.188.894,00	1.369.241.506,00
2/3/2018	5/3/2018	260.188.894,00	1.381.946.761,00
2/4/2018	5/4/2018	260.188.894,00	1.385.700.611,00
2/5/2018	5/5/2018	273.460.856,00	1.385.700.611,00
2/6/2018	5/6/2018	274.067.706,00	1.385.700.611,00
2/7/2018	5/7/2018	347.341.398,00	1.400.275.093,00
2/8/2018	5/8/2018	364.511.974,00	1.431.669.594,00
2/9/2018	5/9/2018	364.511.974,00	1.458.128.698,00
2/10/2018	5/10/2018	364.511.974,00	1.458.128.698,00

RISALAH BUDAYA KINERJA 2018
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



2/11/2018	5/11/2018	364.511.974,00	1.473.917.943,00
2/12/2018	5/12/2018	368.186.659,00	1.473.917.943,00
2/13/2018	5/13/2018	371.139.159,00	1.473.917.943,00
2/14/2018	5/14/2018	383.854.145,00	1.507.488.216,00
2/15/2018	5/15/2018	469.874.005,00	1.602.991.262,00
2/16/2018	5/16/2018	469.874.005,00	1.610.638.983,00
2/17/2018	5/17/2018	469.874.005,00	1.854.899.664,00
2/18/2018	5/18/2018	469.874.005,00	1.858.395.114,00
2/19/2018	5/19/2018	475.046.230,00	1.858.395.114,00
2/20/2018	5/20/2018	476.594.824,00	1.858.395.114,00
2/21/2018	5/21/2018	486.613.304,00	1.866.580.647,00
2/22/2018	5/22/2018	493.663.404,00	1.867.022.638,00
2/23/2018	5/23/2018	494.504.604,00	1.871.601.388,00
2/24/2018	5/24/2018	494.504.604,00	1.880.360.698,00
2/25/2018	5/25/2018	494.504.604,00	1.880.360.698,00
2/26/2018	5/26/2018	494.504.604,00	1.880.360.698,00
2/27/2018	5/27/2018	550.576.186,00	1.880.360.698,00
2/28/2018	5/28/2018	559.519.336,00	1.880.360.698,00
3/1/2018	5/29/2018	559.519.336,00	1.880.360.698,00
3/2/2018	5/30/2018	559.519.336,00	1.892.544.445,00
RATA-RATA		417.847.326,23	1.645.868.959,70

6.1.5 Realisasi Warung

TANGGAL		REALISASI WARUNG MAKAN	
PRE	POST	PRE	POST
2/1/2018	5/1/2018	18.760.300,00	66.794.516,00
2/2/2018	5/2/2018	18.760.300,00	68.475.306,00
2/3/2018	5/3/2018	18.760.300,00	69.487.806,00
2/4/2018	5/4/2018	18.760.300,00	69.987.806,00
2/5/2018	5/5/2018	21.239.350,00	69.987.806,00
2/6/2018	5/6/2018	21.239.350,00	69.987.806,00
2/7/2018	5/7/2018	21.239.350,00	70.297.806,00
2/8/2018	5/8/2018	21.839.350,00	71.557.806,00
2/9/2018	5/9/2018	21.839.350,00	74.732.806,00
2/10/2018	5/10/2018	21.839.350,00	74.732.806,00
2/11/2018	5/11/2018	21.839.350,00	76.093.639,00
2/12/2018	5/12/2018	23.339.350,00	76.093.639,00
2/13/2018	5/13/2018	25.839.350,00	76.093.639,00
2/14/2018	5/14/2018	26.539.350,00	77.093.639,00
2/15/2018	5/15/2018	26.999.350,00	80.573.639,00
2/16/2018	5/16/2018	26.999.350,00	81.628.639,00
2/17/2018	5/17/2018	26.999.350,00	81.628.639,00

RISALAH BUDAYA KINERJA 2018
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



2/18/2018	5/18/2018	26.999.350,00	81.628.639,00
2/19/2018	5/19/2018	28.229.350,00	81.628.639,00
2/20/2018	5/20/2018	28.329.350,00	81.628.639,00
2/21/2018	5/21/2018	28.329.350,00	81.628.639,00
2/22/2018	5/22/2018	29.584.350,00	81.778.639,00
2/23/2018	5/23/2018	29.809.350,00	81.778.639,00
2/24/2018	5/24/2018	29.809.350,00	82.108.639,00
2/25/2018	5/25/2018	29.809.350,00	82.108.639,00
2/26/2018	5/26/2018	29.809.350,00	82.108.639,00
2/27/2018	5/27/2018	30.009.350,00	82.108.639,00
2/28/2018	5/28/2018	31.224.350,00	82.108.639,00
3/1/2018	5/29/2018	31.224.350,00	82.108.639,00
3/2/2018	5/30/2018	32.980.050,00	83.258.639,00
RATA-RATA		25.632.666,67	77.374.335,00

6.1.6 Realisasi Pajak Hiburan

TANGGAL		REALISASI PAJAK HIBURAN	
PRE	POST	PRE	POST
2/1/2018	5/1/2018	221.033.781,00	774.421.960,00
2/2/2018	5/2/2018	240.833.781,00	798.668.460,00
2/3/2018	5/3/2018	240.833.781,00	814.668.460,00
2/4/2018	5/4/2018	240.833.781,00	817.613.460,00
2/5/2018	5/5/2018	243.833.781,00	817.613.460,00
2/6/2018	5/6/2018	243.833.781,00	817.613.460,00
2/7/2018	5/7/2018	244.133.781,00	834.333.960,00
2/8/2018	5/8/2018	244.386.781,00	845.265.210,00
2/9/2018	5/9/2018	257.926.062,00	845.265.210,00
2/10/2018	5/10/2018	257.926.062,00	845.265.210,00
2/11/2018	5/11/2018	257.926.062,00	873.742.917,00
2/12/2018	5/12/2018	271.746.062,00	873.742.917,00
2/13/2018	5/13/2018	274.146.062,00	873.742.917,00
2/14/2018	5/14/2018	284.690.562,00	873.742.917,00
2/15/2018	5/15/2018	288.290.562,00	886.101.042,00
2/16/2018	5/16/2018	288.290.562,00	894.091.742,00
2/17/2018	5/17/2018	288.290.562,00	904.451.042,00
2/18/2018	5/18/2018	288.290.562,00	904.451.042,00
2/19/2018	5/19/2018	297.050.562,00	904.451.042,00
2/20/2018	5/20/2018	300.954.312,00	904.451.042,00
2/21/2018	5/21/2018	339.782.924,00	905.051.042,00
2/22/2018	5/22/2018	343.382.924,00	905.051.042,00
2/23/2018	5/23/2018	343.382.924,00	905.051.042,00
2/24/2018	5/24/2018	343.382.924,00	930.132.892,00

RISALAH BUDAYA KINERJA 2018
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



2/25/2018	5/25/2018	343.382.924,00	931.022.892,00
2/26/2018	5/26/2018	359.901.524,00	931.022.892,00
2/27/2018	5/27/2018	360.351.524,00	931.022.892,00
2/28/2018	5/28/2018	367.726.924,00	947.890.392,00
3/1/2018	5/29/2018	368.326.924,00	947.890.392,00
3/2/2018	5/30/2018	369.366.924,00	952.324.892,00
RATA-RATA		293.807.989,40	879.671.928,00

Terjadi peningkatan pendapatan setelah menerapkan solusi dari permasalahan.

Dengan rincian nilai sebagai berikut:

	Pendapatan pajak daerah	Pendapatan pajak hotel melati	pendapatan pajak losmen dan penginapan	Pendapatan pajak restoran	Pendapatan pajak warung	Pendapatan pajak hiburan
Selisih pendapatan dalam bulan	3.035.686.644,00	33.722.303,00	119.383.673,00	226.507.997,00	2.244.373,00	29.569.789,00
Selisih pendapatan dalam hari	104.678.849,79	1.162.838,03	4.116.678,38	7.810.620,59	77.392,17	1.019.647,90
Selisih pendapatan dalam bulan (%)	1,48%	0,58%	26,90%	4,28%	0,83%	0,49%
Selisih pendapatan dalam hari (%)	0,05%	0,02%	0,93%	0,15%	0,03%	0,02%

Kesimpulan: penerapan solusi dalam mengatasi permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak peningkatan kesadaran wajib pajak.

6.2 Evaluasi Hasil Perbaikan Terhadap Target

Setelah melaksanakan kegiatan sesuai solusi yang disetujui oleh tim, maka diperoleh hasil sebagai berikut:



	realisasi pajak	Realisasi pajak hotel melati	Realisasi pajak losmen dan penginapan	Realisasi pajak restoran	Realisasi pajak warung	Realisasi pajak hiburan
awal	358.841.063,03	5.217.639,86	506.887,93	10.321.739,38	490.336,21	5.114.935,97
target	458.841.063,03	6.217.639,86	1.006.887,93	13.321.739,38	540.336,21	5.914.935,97
realisasi	463.519.912,83	6.380.477,90	4.623.566,31	18.132.359,97	567.728,38	6.134.583,86
Persentase realisasi	101,02%	102,62%	459,19%	136,11%	105,07%	103,71%

Kesimpulan: pelaksanaan solusi dari permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dinyatakan **berhasil**.

6.3 Analisa Dampak Perbaikan

Dalam pelaksanaannya, nilai yang diperbaiki adalah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Perlu adanya penanganan yang lebih baik lagi agar dapat memperbaiki kekurangan disektor lain dalam hal penanganan pajak daerah.

Perbaikan yang dilakukan berdasarkan solusi dari permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat diatasi dengan kerjasama tim. Maka harus ada peraturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam penanganan pajak.

Untuk mengantisipasi kemungkinan lain, maka perlu adanya timbal balik lain yang harus diberikan kepada wajib pajak. Misalkan penghargaan bagi wajib pajak teladan.

6.4 Analisa Nilai Improvement

No.	Nilai Yang Ditingkatkan	Sebelum	Sesudah	Peningkatan Nilai
1	Ketaatan dalam membayar pajak	Memaniplulasi data untuk mengurangi nilai pajak	Melaporkan sesuai keadaan dilapangan	kepatuhan
2	Kerjasama TIM	Antar SKPD bergerak sendiri-sendiri	Antar SKPD bergerak bersama-sama	TIM



6.5 Analisa Cost And Benefit

No.	ITEM BIAYA	JUMLAH
I. ANALISA BIAYA		
1	Biaya Tim Pemeriksa Pajak	Rp. 552.270.000,00/tahun
	Total biaya	Rp. 552.270.000,00
II. ANALISA BENEFIT FINANSIAL		
1	Kenaikan realisasi pendapatan harian bulan mei 2018	Rp. 4.678.849,80/hari
	Total Benefit Finansial	Rp. 4.678.849,80/hari
III. ANALISA BENEFIT FINANSIAL		
1	Kerjasama TIM antar SKPD	<i>Intangible</i>
	Total Benefit Non Finansial	<i>Intangible</i>

6.6 Komentar dan Persetujuan Manaiemen

@ optimal log.

Diketahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si

Di setuju oleh,
Fasilitator,

Dra. FRANSCISKA SUDARMI, M.si

Ditetapkan oleh,
Ketua KBK,

TRI KUSUMA JAYA, S.STP



Langkah 7.
MEMBUAT STANDAR BARU

7.1 Standar Masukan

Peningkatan kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang menjadi sample maupun yang berpotensi. Faktor terbesar adalah memaksimalkan usaha dengan mendatangi langsung ke wajib pajak. Sehingga selain meningkatkan kesadaran juga menerima aspirasi dari wajib pajak. Proses perbaikan ini dapat dikembangkan secara berkesinambungan.

7.2 Standar Proses

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Bapenda	Tim Pemeriksa	Penolakan	WP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemeriksaan Pajak Daerah								
2.	Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah								
3.	Surat pernyataan penolakan dan berita acara penolakan								
4.	Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan								
5.	Surat Permintaan Peminjaman Dokumen dan Permintaan keterangan (interview)								
6.	Berita acara Penolakan Pemeriksaan								
7.	Penyegehan								
8.	Penetapan scr Jabatan								
9.	Pemeriksaan dokumen/keterangan/bukti administrasi								



No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Bapenda	Tim Pemeriksa	Penolakan	WP	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan (SPHP)								
11.	Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (PAHP)								
12.	Surat Pernyataan Persetujuan hasil Pemeriksaan								
13.	Penetapan scr Jabatan								
14.	Risalah Pembahasan dan berita acara dan pembahasan hasil pemeriksaan								
15.	Laporan hasil Pemeriksaan								
16.	Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Tagihan Pajak Daerah								

7.3 Standar Hasil

Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menjadi hasil yang diinginkan. Dengan melakukan pemantauan dan penerapan inovasi dalam mempermudah pendataan, penghitungan, pembayaran, dan pengawasan menjadi sangat penting. Dengan meningkatnya pendapatan rata-rata, maka solusi bisa dinyatakan berhasil.

7.4 Pembakuan Standar

Terlampir



7.5 Komentar dan Persetujuan Manajemen

penyusunan masalah mtd baik

Diketahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah


NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si

Di setuju oleh,
Fasilitator,


Dra. FRANSCISKA SUDARMI, M.si

Ditetapkan oleh,
Ketua KBK,


TRI KUSUMA JAYA, S.STP



Langkah 8.

MENCARI DATA BARU DAN MENETAPKAN TEMA BERIKUTNYA

8.1 Latar Belakang Penentuan Tema

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota untuk menggunakan Pajak Parkir sebagai salah satu instrumen untuk pengendalian lalu lintas di wilayahnya masing-masing. Hal ini dapat terlihat pada kenaikan tarif yang semula tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 sebesar 20%, dinaikkan menjadi 30%. Kenaikan dimaksudkan memberi ruang bagi Pemerintah Daerah dapat memberlakukan tarif tinggi pada jasa parkir sehingga terjadi disinsentif bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi. Apabila kenaikan tarif parkir tidak disertai kenaikan tarif Pajak Parkir, maka kenaikan tarif parkir hanya akan menguntungkan pengusaha pengelola jasa parkir. Bila kenaikan tarif parkir juga disertai pembelakuan kenaikan tarif Pajak Parkir, maka perolehan pendapatan bisnis parkir juga akan masuk dalam Kas Pemerintah Daerah.

Definisi Parkir menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, makna Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Adapun istilah Berhenti diartikan sebagai keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

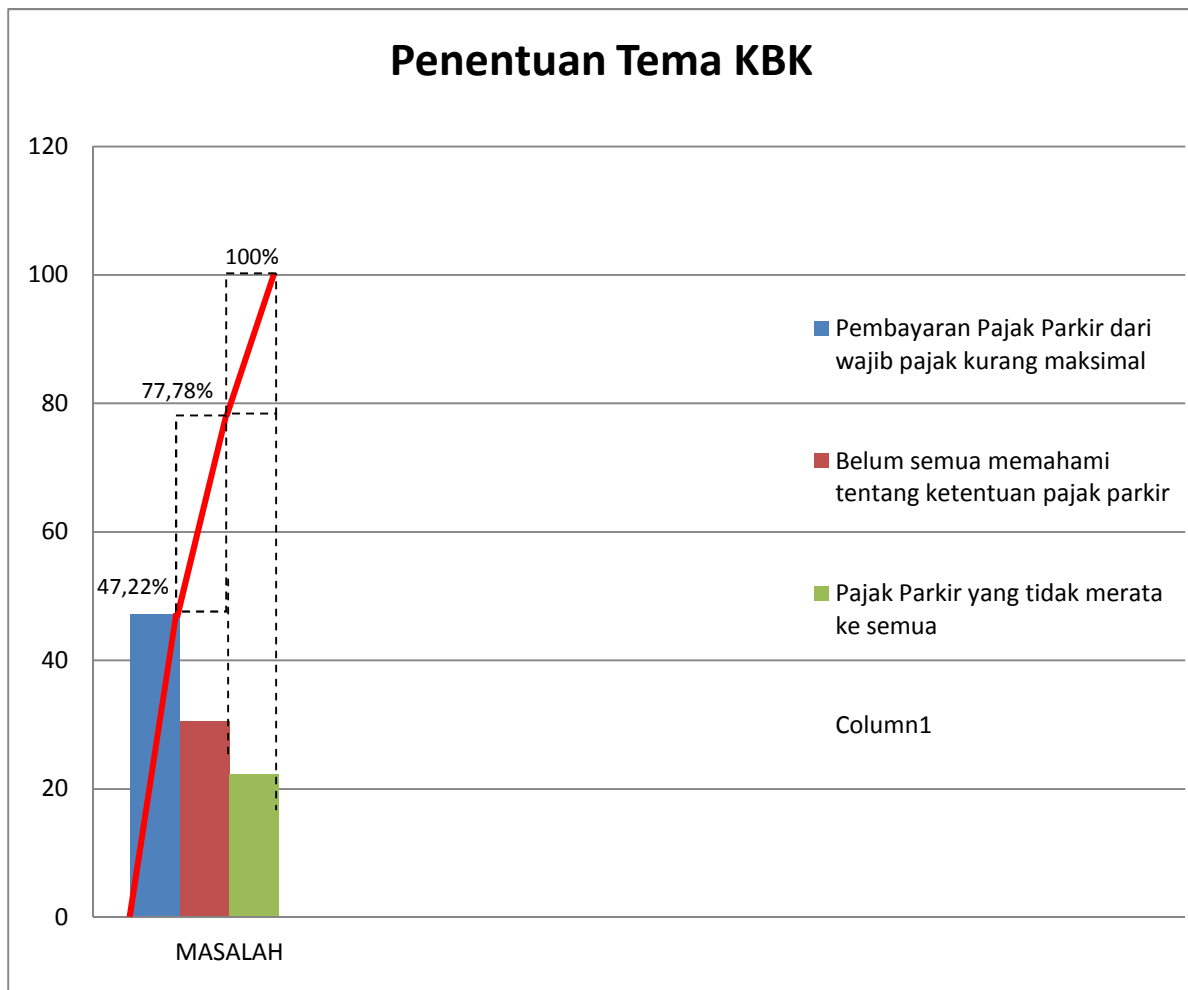
Perbedaan dengan Retribusi Parkir salah satunya adalah Retribusi Parkir dipungut atas jasa layanan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pengelolaan parkir yang dikenakan pajak parkir adalah pengusaha yang bergerak di bidang usaha perpakiran.

Penerapan pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi belum maksimal, perlu adanya penanganan lebih mendalam tentang penerapan pajak parki di Kabupaten Banyuwangi.

Permasalahan yang rencanakan akan dibahas dalam KBK berikutnya adalah tentang Pajak Parkir dengan penentuan Tema sebagai Berikut:



Kode	Masalah	Frek.	Kum.	%	% Kum
A	Pembayaran Pajak Parkir dari wajib pajak kurang maksimal	17	17	47,22%	47,22%
B	Belum semua memahami tentang ketentuan pajak parkir	11	28	30,56%	77,78%
C	Pajak Parkir yang tidak merata ke semua	8	36	22,22%	100,00%



Kesimpulan Tema: Pembayaran Pajak Parkir dari wajib pajak kurang maksimal



8.2 Jadwal Kegiatan

PDC A	LANGKA H	KEGIATAN	PERIODE JULI S/D DESEMBER 2018														JUMLAH PERTEMUAN			
			JUL		AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOV		RENCAN A	REALISAS I
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
P	1	MENENTUKAN TEMA & JUDUL	■	■															4	4
	2	MENGANALISA PENYEBAB			■	■													4	4
	3	MENGUJI PENYEBAB DOMINAN					■	■											2	2
D	4	MERENCANAKAN PERBAIKAN					■	■										4	4	
	5	MELAKSANAKAN PERBAIKAN							■	■	■	■	■	■				10	10	
C	6	MENELITI HASIL											■	■					4	4
A	7	MEMBUAT STANDAR BARU													■				2	2
	8	MENCARI DATA BARU & MENETAPKAN														■			2	2
			JUMLAH														32	32		

8.3 Komentar dan Persetujuan Manajemen

Baik, terima kasih atas kerjasamanya

Diketahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFTUL HUDA, S.Sos, M.Si

Di setujui oleh,
Fasilitator,

Dra. FRANSCISKA SUDARMI, M.Si

Ditetapkan oleh,
Ketua KBK,

TRI KUSUMA JAYA, S.STP